

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN TERHADAP WARGA  
BINAAN KHUSUS NARKOTIKA PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS III  
SAWAHLUNTO**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**AHMAD PAJRI**

**1910112064**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**




**Pembimbing :**

**Nelwitis, S.H., M.H**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2024**

	No. Alumni Universitas	Nama Alumni : <b>Ahmad Pajri</b>	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Cubadak, 05 Januari 2000	f. Tanggal Lulus : 27 Februari 2024	g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
b. Nama Orang tua: Ismail, Nurkhairiah	h. Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan	i. IPK : 3,88	
c. Fakultas : Hukum	d. PK : Hukum Pidana	j. Alamat : Koto Panjang, Cubadak, Kec. Duo Koto, Pasaman	
e. No. BP : 1910112064			

**PELAKSANAAN ASESMEN RISIKO DAN KEBUTUHAN TERHADAP WARGA BINAAN KHUSUS NARKOTIKA PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO**  
(Ahmad Pajri, 1910112064, Universitas Andalas, Hukum Pidana, 78 Halaman, 2024)




**ABSTRAK**

Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap warga binaan khusus narkoba pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto pada dasarnya adanya alasan lain yang dimuat dalam Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan guna kebutuhan pembinaan risiko melarikan diri risiko berbahaya bagi orang lain dan kesehatan mental fisik dan psikologis warga binaan masyarakat khusus narkoba. Bapas Kelas I Padang telah meregistrasi permintaan asesmen dari Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto yang dilaksanakan pada tahun 2022. Rumusan Masalah: Bagaimana Pelaksanaan Asesmen Risiko Dan Kebutuhan Terhadap Warga Binaan Khusus Narkoba Pada Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto? Serta Bagaimana, Kendala dan Solusi yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan di Lapas Narkoba Kelas III Sawahlunto? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu aturan diimplementasikan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil belum terlaksana secara optimal di lapangan. Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan instrumen seperti instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN), instrumen asesmen risiko residivis Indonesia (RRI), dan asesmen kebutuhan Kriminogenik. Pelaksanaan asesmen ini nantinya dapat menentukan program pembinaan yang dapat dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti pembinaan kemandirian dan kepribadian. Kendala yang dihadapi oleh Bapas Kelas I Padang berkaitan dengan jarak yang jauh, minimnya anggaran, kurangnya koordinasi, serta tidak aktifnya pos Bapas di Sumatera Barat yang menyebabkan luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Padang. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pengaktifan pos Bapas sebagai bentuk antisipasi, terkait pendirian Bapas di setiap Kabupaten atau Kotamadya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

**Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan Khusus Narkoba, Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada .. Februari 2024.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
		
Ahmad Pajri	Tenofrima S.H., M.H	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



**IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT OF RISK AND NEEDS OF SPECIAL  
NARCOTICS INTEGRATED CITIZENS IN CLASS III SAWAHLUNTO  
NARCOTICS PRISON**

*(Ahmad Pajri, 1910112064, Faculty of Law, Andalas University, 78 pages, 2024  
1.Nelwitis,SH., MH. 2. Riki Afrizal,SH., MH)*

**ABSTRACT**

The implementation of risk assessment and needs for narcotics special assisted citizens at Sawahlunto Class III Narcotics Prison, basically there are other reasons contained in article 36 paragraph 4 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections that risk assessment and needs are related to the need for escaping risk coaching, risk of danger to others, and mental, physical and psychological health of residents assisted by the special narcotics community. Bapas Class I Padang has registered an assessment request from Sawahlunto Class III Narcotics Prison which will be carried out in 2022. Problem Statement: How is the Risk and Needs Assessment Carried Out for Narcotics Special Assisted Citizens in Sawahlunto Class III Narcotics Prison? And What Are the Obstacles and Solutions Faced in the Implementation of Risk and Needs Assessment in Sawahlunto Class III Narcotics Prison? This research uses an empirical juridical approach method, namely research conducted by reviewing a rule implemented. Based on this research, results have not been carried out optimally in the field. Considering the implementation of this risk and need assessment carried out by Bapas Class I Padang on prison-assisted residents in Sawahlunto Class III Narcotics Prison, which in the implementation of the assessment is carried out by this community supervisor using several instruments such as the prisoner placement *screening* instrument (ISPN), the Indonesian recidivist risk assessment instrument (RRI), and the criminogenic needs assessment. The implementation of this assessment can later determine the development programs that can be carried out on prison-assisted residents such as independence and personality development. The obstacles faced by Padang Class I Bapas are related to long distances, lack of budget, lack of coordination, and inactivity of Bapas posts in West Sumatra which cause the vast working area of Padang Class I Bapas. Efforts to overcome this problem are the activation of Bapas posts as a form of anticipation, related to the establishment of Bapas in each Regency or Municipality according to Law Number 12 of 1995.

**Keywords : Correctional System, Special Assisted Citizens for Narcotics, Implementation of Risk and Needs Assessment.**